

Strategi Adaptasi Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam Menjaga Kualitas Pelayanan Publik

Surya Gilang Ananda¹, Sufian Hamim², Raden Imam Al Hafis³

Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau

Email : suryagilangananda@gmail.com

Published: June , 2026

ABSTRAK

Kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Namun, kebijakan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk melakukan berbagai penyesuaian agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal di tengah keterbatasan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk strategi adaptasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam merespons kebijakan efisiensi anggaran serta implikasinya terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, adaptasi organisasi, dan pelayanan publik. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi adaptasi pemerintah daerah dilakukan melalui penetapan prioritas program dan kegiatan, optimalisasi sumber daya organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi pelayanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik. Strategi tersebut berimplikasi positif terhadap kualitas pelayanan publik, terutama dalam meningkatkan efisiensi proses pelayanan, memperluas akses layanan, dan mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan adaptasi pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan melakukan efisiensi anggaran, tetapi juga oleh kemampuan mengelola perubahan dan mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kata Kunci: Adaptasi, Efisiensi, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

Budget efficiency policies are one of the government's steps to achieve more effective, efficient, and accountable financial management. However, these policies require local governments to make various adjustments to ensure optimal governance and public service delivery amidst limited resources. This study aims to analyze the adaptation strategies implemented by local governments in response to budget efficiency policies and their implications for the quality of public services. The study used a qualitative approach using library research. Data were obtained through a review of various relevant literature sources, including books, scientific journals, laws and regulations, and policy documents related to budget efficiency, organizational adaptation, and public services. Data analysis was conducted descriptively through the stages of collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. The study results indicate that local government adaptation strategies are implemented through prioritizing programs and activities, optimizing organizational resources, utilizing information technology, digitizing services, and developing public service innovations. These strategies have positive implications for the quality of public services, particularly in improving the efficiency of service processes, expanding service access, and maintaining the quality of service to the public. Thus, the success of local government adaptation is determined not only by the ability to achieve budget efficiency, but also by the ability to manage change and develop innovation in public service delivery.

Keywords: Adaptation, Efficiency, Public Service.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat (Nurmandi, dkk, 2021: 50). Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena secara langsung berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk senantiasa menjaga efektivitas dan kualitas pelayanan publik meskipun menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya (Dere, 2024: 1259).

Beberapa waktu terakhir, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara berbunyi dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas Pemerintah, Pemerintah melakukan penyesuaian belanja negara melalui efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara terdiri atas: a. efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan efisiensi Transfer Keuangan Daerah.

Adanya kebijakan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai program, kegiatan, dan pola penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisiensi anggaran pada satu sisi diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel (Lathifah, dkk, 2024: 587), namun di sisi lain berpotensi menimbulkan tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik apabila tidak diikuti dengan strategi pengelolaan organisasi yang tepat.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan adaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan kebijakan. Adaptasi menjadi aspek penting dalam administrasi publik karena organisasi pemerintah harus mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai tekanan eksternal tanpa mengurangi pencapaian tujuan organisasi (Munawaroh dan Amanda, 2025: 3). Kemampuan beradaptasi dapat diwujudkan melalui penataan prioritas program, optimalisasi sumber daya organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan inovasi pelayanan, maupun penguatan koordinasi antarunit kerja. Berbagai strategi tersebut merupakan bentuk respons organisasi dalam mempertahankan kinerja dan efektivitas pelayanan di tengah keterbatasan anggaran.

Perspektif administrasi publik, adaptasi organisasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bertahan menghadapi perubahan (Iqrom dan Jailani, 2026: 69), namun juga mencerminkan kapasitas pemerintah dalam melakukan transformasi tata kelola untuk menghasilkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif. Oleh karena itu, strategi adaptasi yang diterapkan pemerintah daerah menjadi penting untuk dikaji guna memahami bagaimana organisasi publik merespons kebijakan efisiensi anggaran sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Iqrom dan Jailani, 2026: 61).

Meskipun berbagai kajian telah membahas efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik secara terpisah, kajian yang menempatkan strategi adaptasi pemerintah daerah sebagai variabel utama dalam menjembatani hubungan antara kebijakan efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan efisiensi anggaran tidak hanya diukur dari penghematan belanja, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk strategi adaptasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam merespons kebijakan efisiensi anggaran serta mengkaji implikasi strategi adaptasi tersebut terhadap kualitas pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam strategi adaptasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam merespons kebijakan efisiensi anggaran serta implikasinya terhadap kualitas pelayanan publik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji berbagai konsep, teori, kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fenomena yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Bentuk Strategi Adaptasi Pemerintah Daerah dalam Merespons Kebijakan Efisiensi Anggaran

Melalui administrasi publik, kebijakan efisiensi anggaran dapat dipahami sebagai perubahan lingkungan eksternal yang menuntut organisasi publik untuk melakukan berbagai penyesuaian agar tetap mampu menjalankan fungsi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Novianto, 2020: 22). Menurut Bennett menjelaskan bahwa asumsi dasar adaptasi berkembang dari pemahaman yang bersifat evolusionari yang senantiasa melihat manusia selalu berupaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik secara biologis atau genetik maupun secara sosial dan budaya. Sehingga proses adaptasi dalam evolusi melibatkan seleksi genetik dan varian budaya yang dianggap sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan (Bennett, 1979: 257). Oleh karena itu, kemampuan adaptasi menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

Kebijakan efisiensi anggaran pada dasarnya bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya publik secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Namun demikian, keterbatasan anggaran yang muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi ini menuntut organisasi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai bentuk penyesuaian yang tidak hanya berorientasi pada penghematan anggaran, tetapi juga pada upaya mempertahankan kualitas kinerja organisasi (Pramewasari, dkk, 2023: 940).

Berdasarkan teori adaptasi organisasi Bennett, bentuk adaptasi pertama yang dilakukan pemerintah daerah adalah penyesuaian terhadap lingkungan kebijakan. Penyesuaian ini diwujudkan melalui penetapan skala prioritas program dan kegiatan yang dianggap memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan seleksi terhadap berbagai program berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Program-program yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan sosial tetap menjadi prioritas utama, sedangkan kegiatan yang bersifat seremonial atau kurang mendukung pelayanan publik cenderung mengalami pengurangan alokasi anggaran. Penyesuaian tersebut menunjukkan kemampuan organisasi dalam merespons perubahan lingkungan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan.

Bentuk adaptasi kedua adalah **optimalisasi sumber daya organisasi**. Bennett menjelaskan bahwa kemampuan beradaptasi tidak hanya ditentukan oleh respons terhadap lingkungan eksternal, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki (Bennett, 1979: 257). Dalam konteks efisiensi anggaran, pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran yang tersedia secara lebih efektif. Optimalisasi dilakukan melalui peningkatan produktivitas aparatur, penyederhanaan prosedur kerja, pengurangan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa keterbatasan sumber daya tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Bentuk adaptasi ketiga adalah pengembangan strategi dan inovasi baru. Menurut Bennett, organisasi yang mampu bertahan dalam lingkungan yang berubah adalah organisasi yang mampu menciptakan strategi baru untuk menjawab tantangan yang dihadapi. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengembangan strategi baru diwujudkan melalui transformasi digital, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengembangan layanan daring, serta berbagai inovasi pelayanan publik lainnya (Arabiah, dkk, 2026: 71). Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi proses kerja sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Melalui inovasi tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efektif meskipun berada dalam kondisi keterbatasan anggaran (Bennett, 1979: 257).

Bentuk adaptasi keempat adalah pemeliharaan fungsi organisasi dan pelayanan publik. Adaptasi tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan fungsi utama organisasi (Bennett, 1979: 257). Dalam konteks pemerintahan daerah, fungsi utama tersebut adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, berbagai strategi efisiensi yang diterapkan harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah dituntut untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak menyebabkan terganggunya pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan standar pelayanan, pengembangan mekanisme pelayanan yang lebih efektif, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Dengan demikian strategi adaptasi pemerintah daerah dalam merespons kebijakan efisiensi anggaran dapat dipahami sebagai serangkaian upaya penyesuaian terhadap lingkungan kebijakan, optimalisasi sumber daya organisasi, pengembangan strategi dan inovasi baru, serta pemeliharaan fungsi pelayanan publik. Keempat bentuk adaptasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan secara efektif.

Implikasi Strategi Adaptasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Keberhasilan suatu proses adaptasi dapat dilihat dari kemampuan organisasi mempertahankan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai meskipun menghadapi perubahan lingkungan (Arabiah, dkk, 2026: 75). Pada konteks pemerintahan daerah, tujuan utama yang harus tetap dipertahankan adalah terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, strategi adaptasi yang dilakukan pemerintah daerah memiliki implikasi yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.

Salah satu implikasi yang paling menonjol adalah meningkatnya efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. Penyesuaian program dan optimalisasi sumber daya memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Kondisi tersebut mendorong terciptanya pelayanan yang lebih efektif karena sumber daya yang tersedia digunakan untuk mendukung kebutuhan pelayanan yang paling prioritas. Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak selalu identik dengan penurunan kualitas pelayanan, tetapi justru dapat meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya publik (Darmawan, dkk, 2025: 13).

Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan juga memberikan implikasi positif terhadap aksesibilitas dan responsivitas pelayanan publik. Transformasi digital memungkinkan masyarakat memperoleh layanan secara lebih mudah, cepat, dan transparan tanpa harus menghadapi prosedur birokrasi yang panjang. Selain mengurangi biaya operasional pemerintah, penggunaan teknologi juga meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi maupun layanan administrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa adaptasi melalui inovasi teknologi mampu memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat (Arabiah, dkk, 2026: 71).

Selain itu, strategi adaptasi yang dilakukan melalui penyederhanaan birokrasi dan penguatan koordinasi organisasi turut berimplikasi pada peningkatan efektivitas pelayanan. Penyederhanaan prosedur pelayanan memungkinkan proses pelayanan menjadi lebih cepat dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat (Gunawan dan Rosalia, 2026: 55). Sementara itu, koordinasi yang lebih baik antarperangkat daerah dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan serta meningkatkan integrasi layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kedua aspek tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan dari sisi kecepatan, kepastian, dan kemudahan pelayanan.

Namun demikian keberhasilan adaptasi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dalam mengelola perubahan. Apabila strategi adaptasi tidak direncanakan secara matang, maka kebijakan efisiensi anggaran dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pelayanan publik (Bennett, 1979: 257). Pengurangan anggaran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan pelayanan berpotensi mengurangi dukungan operasional organisasi, membatasi ketersediaan sarana dan prasarana, serta menurunkan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menurunkan efektivitas pelayanan dan mengurangi tingkat kepuasan masyarakat.

Oleh karena itu, implikasi strategi adaptasi terhadap kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip efisiensi dengan prinsip pelayanan publik. Adaptasi yang berhasil adalah adaptasi yang tidak hanya mampu menyesuaikan organisasi terhadap keterbatasan fiskal, tetapi juga mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan kata lain, kualitas pelayanan publik menjadi indikator utama yang menunjukkan keberhasilan proses adaptasi organisasi pemerintah daerah dalam merespons kebijakan efisiensi anggaran (Darmawan, dkk, 2025: 13).

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa strategi adaptasi yang dilakukan pemerintah daerah melalui penyesuaian kebijakan, optimalisasi sumber daya, pengembangan inovasi, dan pemeliharaan

fungsi pelayanan publik cenderung menghasilkan implikasi positif terhadap kualitas pelayanan publik. Keberhasilan adaptasi tersebut membuktikan bahwa organisasi publik yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan akan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menjaga efektivitas pelayanan kepada masyarakat meskipun berada dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan tekanan fiskal.

PEMBAHASAN

Analisis Strategi Adaptasi Pemerintah Daerah dalam Merespons Kebijakan Efisiensi Anggaran

Perspektif administrasi publik, adaptasi organisasi merupakan kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan eksternal guna mempertahankan keberlangsungan organisasi dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perubahan lingkungan tersebut dapat berupa perubahan kebijakan, kondisi sosial, perkembangan teknologi, dinamika ekonomi, maupun perubahan kebutuhan masyarakat (Arabiah, dkk, 2026: 71). Pada konteks penelitian ini, kebijakan efisiensi anggaran dapat dipandang sebagai bentuk tekanan eksternal yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan berbagai penyesuaian dalam tata kelola organisasi agar tetap mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal (Darmawan, dkk, 2025: 12).

Organisasi pada dasarnya tidak berada dalam kondisi yang statis, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkungan yang terus berubah. Perubahan lingkungan tersebut menuntut organisasi untuk melakukan berbagai bentuk penyesuaian agar tetap mampu bertahan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan organisasi dalam merespons perubahan lingkungan inilah yang menjadi indikator utama keberhasilan adaptasi. Semakin baik kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan, maka semakin besar pula peluang organisasi untuk mempertahankan efektivitas kinerjanya (Azkia, dkk, 2025: 126).

Kaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya yang dapat memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan berbagai strategi adaptasi yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan pengeluaran, tetapi juga pada upaya mempertahankan kualitas kinerja organisasi (Darmawan, dkk, 2025: 13). Oleh karena itu, efisiensi anggaran perlu dipahami sebagai momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola organisasi, bukan semata-mata sebagai kebijakan penghematan anggaran.

Berdasarkan hasil kajian, bentuk adaptasi pertama yang dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Penyesuaian ini terlihat dari kecenderungan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Program pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan sosial, tetap menjadi fokus utama meskipun terjadi keterbatasan anggaran. Sebaliknya, program-program yang bersifat pendukung, seremonial, atau memiliki tingkat urgensi yang relatif rendah cenderung mengalami pengurangan alokasi anggaran. Dalam perspektif Bennett, langkah tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan melalui proses penyesuaian tujuan dan strategi organisasi agar tetap relevan dengan kondisi yang dihadapi.

Bentuk adaptasi berikutnya adalah optimalisasi sumber daya organisasi. Keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber daya keuangan. Optimalisasi ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas aparatur, penyederhanaan proses kerja, pengurangan kegiatan yang kurang produktif, serta pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif (Hikmah, dkk, 2026: 916). Pada teori adaptasi organisasi, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal merupakan salah satu indikator bahwa organisasi memiliki kapasitas adaptif yang baik. Organisasi yang mampu beradaptasi tidak selalu ditandai dengan ketersediaan sumber daya yang besar, tetapi ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga melakukan adaptasi melalui pengembangan strategi dan inovasi baru. Perubahan lingkungan sering kali mendorong organisasi untuk menciptakan pola-pola baru dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam konteks efisiensi anggaran, pengembangan inovasi menjadi salah satu pilihan strategis untuk mempertahankan efektivitas organisasi. Digitalisasi pelayanan publik,

penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi pemerintahan, pengembangan sistem pelayanan berbasis elektronik, serta integrasi layanan merupakan contoh inovasi yang berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan anggaran. Inovasi tersebut menunjukkan bahwa tekanan fiskal tidak selalu menghasilkan dampak negatif, melainkan dapat menjadi pendorong bagi organisasi untuk melakukan transformasi yang lebih efektif dan efisien (Hikmah, dkk, 2026: 918).

Transformasi digital yang dilakukan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk adaptasi yang paling relevan dalam era pemerintahan modern. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan berbagai proses pelayanan dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Selain mampu menekan biaya operasional, digitalisasi juga meningkatkan kualitas pengelolaan data dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif adaptasi organisasi, pemanfaatan teknologi menunjukkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan perubahan lingkungan sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas organisasi (Salman, 2024: 63).

Selain inovasi dan digitalisasi, adaptasi juga terlihat melalui upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan fungsi-fungsi pelayanan publik. Menurut Bennett, tujuan utama adaptasi bukan hanya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa fungsi utama organisasi tetap berjalan secara efektif. Konteks pada pemerintahan daerah, fungsi utama tersebut adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, berbagai kebijakan efisiensi yang diterapkan harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk menjaga keseimbangan antara upaya penghematan anggaran dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas (Salman, 2024: 63).

Lebih jauh, strategi adaptasi pemerintah daerah menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan organisasi publik. Jika pada masa sebelumnya keberhasilan organisasi sering diukur berdasarkan besarnya anggaran yang dikelola, maka dalam kondisi efisiensi anggaran keberhasilan organisasi lebih ditentukan oleh kemampuan menghasilkan kinerja yang optimal dengan sumber daya yang terbatas (Pribadi, dkk, 2026: 39). Perubahan paradigma tersebut sejalan dengan perkembangan administrasi publik modern yang menekankan prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil (*results-oriented governance*). Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak lagi dipandang sebagai hambatan bagi organisasi publik, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Analisis ini menunjukkan bahwa strategi adaptasi pemerintah daerah dalam merespons kebijakan efisiensi anggaran tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya pengurangan belanja. Adaptasi merupakan proses yang lebih luas yang mencakup penyesuaian kebijakan, optimalisasi sumber daya, pengembangan inovasi, transformasi digital, serta penguatan kapasitas organisasi dalam mempertahankan fungsi pelayanan publik. Berbagai bentuk adaptasi tersebut menggambarkan kemampuan organisasi pemerintah daerah dalam merespons perubahan lingkungan secara dinamis dan strategis (Bennett, 1979: 257).

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian terhadap lingkungan eksternal tanpa kehilangan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, organisasi yang adaptif adalah organisasi yang mampu mengubah tantangan menjadi peluang untuk melakukan perbaikan tata kelola, meningkatkan efektivitas kinerja, dan memperkuat kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kemampuan adaptasi menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika kebijakan fiskal yang semakin kompleks dan menuntut pengelolaan organisasi yang lebih inovatif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Analisis Implikasi Strategi Adaptasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif administrasi publik, kualitas pelayanan tidak hanya mencerminkan kemampuan organisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga menunjukkan tingkat efektivitas, responsivitas, akuntabilitas, dan profesionalisme birokrasi (Umami, dkk, 2025: 3145). Oleh karena itu, setiap kebijakan yang memengaruhi kapasitas organisasi pemerintah, termasuk kebijakan efisiensi anggaran, akan memiliki konsekuensi terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Kebijakan efisiensi anggaran sering kali dipersepsikan sebagai kebijakan yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik karena berkurangnya sumber daya yang dapat digunakan untuk

mendukung operasional organisasi. Pandangan tersebut muncul karena pelayanan publik pada dasarnya membutuhkan dukungan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem pendukung lainnya agar dapat berjalan secara optimal. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa dampak efisiensi anggaran terhadap kualitas pelayanan publik tidak selalu bersifat negatif. Implikasi yang muncul sangat bergantung pada kemampuan organisasi pemerintah daerah dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dihadapi.

Organisasi yang mampu beradaptasi secara efektif akan tetap mampu menjalankan fungsi utamanya meskipun menghadapi tekanan atau keterbatasan dari lingkungan eksternal. Hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki organisasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya tersebut secara efektif. Dengan kata lain, keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas adaptif organisasi dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran (Hikmah, dkk, 2026: 916).

Salah satu implikasi positif yang muncul dari strategi adaptasi adalah meningkatnya efisiensi proses pelayanan publik. Berbagai upaya penyederhanaan prosedur, pengurangan tahapan birokrasi yang tidak diperlukan, serta penataan ulang proses kerja memungkinkan pelayanan diberikan dengan lebih cepat dan efektif. Sebelum diterapkannya berbagai strategi adaptasi, banyak pelayanan publik yang masih menghadapi persoalan berupa prosedur yang panjang, birokrasi yang berlapis, serta penggunaan sumber daya yang kurang efisien. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan pelayanan menjadi lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui strategi adaptasi yang tepat, pemerintah daerah dapat mengurangi berbagai hambatan administratif sehingga pelayanan menjadi lebih sederhana, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik juga memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Transformasi digital memungkinkan berbagai layanan pemerintahan dilakukan secara elektronik sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tanpa harus datang secara langsung ke kantor pemerintah (Salman, 2024: 63). Digitalisasi pelayanan tidak hanya meningkatkan kemudahan akses, tetapi juga mempercepat waktu pelayanan, mengurangi biaya administrasi, serta meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks ini, strategi adaptasi melalui pemanfaatan teknologi menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dapat menjadi pendorong bagi organisasi untuk mengembangkan sistem pelayanan yang lebih modern dan efisien.

Selain meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan, strategi adaptasi juga berimplikasi pada peningkatan responsivitas organisasi publik. Organisasi yang adaptif cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenali perubahan kebutuhan masyarakat dan meresponsnya secara cepat (Garmana, 2025: 54). Kemampuan tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan masyarakat yang semakin dinamis dan tuntutan pelayanan yang terus meningkat. Melalui berbagai inovasi pelayanan yang dikembangkan, pemerintah daerah dapat memberikan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa harus bergantung pada peningkatan anggaran secara terus-menerus. Dengan demikian, adaptasi organisasi dapat memperkuat kemampuan birokrasi dalam memberikan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan publik (Seran, dkk, 2022: 15).

Implikasi lainnya adalah meningkatnya efektivitas tata kelola pelayanan publik. Strategi adaptasi yang dilakukan melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah, integrasi layanan, dan pemanfaatan data berbasis teknologi memungkinkan proses pelayanan menjadi lebih terstruktur dan terkoordinasi (Salman, 2024: 65). Integrasi layanan dapat mengurangi duplikasi program dan tumpang tindih kewenangan yang selama ini menjadi salah satu hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akibatnya, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, lebih jelas, dan lebih terintegrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi adaptasi tidak hanya berpengaruh terhadap aspek teknis pelayanan, tetapi juga terhadap kualitas tata kelola organisasi secara keseluruhan.

Di sisi lain, hasil kajian juga menunjukkan bahwa strategi adaptasi tidak selalu menghasilkan implikasi positif apabila tidak didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai. Keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kompetensi aparatur, kurangnya dukungan teknologi, serta lemahnya kepemimpinan organisasi dapat menghambat keberhasilan proses adaptasi (Salman, 2024: 63). Pada kondisi demikian, kebijakan efisiensi anggaran justru berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik

karena organisasi tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan penyesuaian secara efektif. Oleh sebab itu, adaptasi organisasi tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan prosedur atau pengurangan anggaran, melainkan sebagai proses transformasi yang membutuhkan dukungan sumber daya dan kapasitas kelembagaan yang memadai.

Selain itu, terdapat risiko bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat berdampak pada berkurangnya dukungan operasional terhadap pelayanan publik apabila dilakukan secara tidak proporsional. Pengurangan anggaran yang tidak mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dapat mengakibatkan keterbatasan fasilitas pelayanan, berkurangnya kegiatan pendukung, serta menurunnya kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut, masyarakat berpotensi menerima pelayanan yang kurang optimal baik dari segi kecepatan, kualitas, maupun kenyamanan pelayanan. Oleh karena itu, strategi adaptasi harus dirancang secara hati-hati agar tujuan efisiensi anggaran tidak bertentangan dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik (Ausat, dkk, 2025: 1).

Kualitas pelayanan publik tidak lagi diukur hanya dari kuantitas layanan yang diberikan, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai publik (*public value*). Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan organisasi publik terletak pada kemampuannya memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat melalui penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien (Garmana, 2025: 54). Oleh karena itu, strategi adaptasi yang berhasil adalah strategi yang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi penggunaan anggaran dan penciptaan nilai publik melalui pelayanan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil kajian, dapat dipahami bahwa implikasi strategi adaptasi terhadap kualitas pelayanan publik bersifat multidimensional. Strategi adaptasi yang dilakukan melalui penyesuaian prioritas program, optimalisasi sumber daya organisasi, transformasi digital, inovasi pelayanan, serta penguatan koordinasi organisasi cenderung menghasilkan dampak positif terhadap efektivitas, efisiensi, aksesibilitas, dan responsivitas pelayanan publik. Sebaliknya, kegagalan organisasi dalam melakukan adaptasi dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan akibat ketidakmampuan organisasi dalam mengelola perubahan yang terjadi (Garmana, 2025: 54).

Dengan demikian, keberhasilan strategi adaptasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penghematan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan, memperkuat kapasitas kelembagaan, mengembangkan inovasi, serta mempertahankan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik menjadi indikator penting yang menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan (Karim, dkk, 2023: 162). Semakin baik kemampuan organisasi dalam melakukan adaptasi, maka semakin besar pula peluang organisasi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah dinamika kebijakan fiskal yang terus berkembang. Oleh karena itu, adaptasi organisasi dapat dipandang sebagai prasyarat penting bagi terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi adaptasi yang dilakukan antara lain melalui penetapan prioritas program dan kegiatan, optimalisasi sumber daya organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi pelayanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik. Berbagai strategi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran tidak selalu menjadi penghambat bagi penyelenggaraan pemerintahan, melainkan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola organisasi.

Strategi adaptasi yang diterapkan pemerintah daerah memiliki implikasi yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Adaptasi yang dilakukan secara tepat mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, memperluas akses layanan, dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan adaptasi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya, mengembangkan inovasi, dan mempertahankan orientasi pelayanan publik sehingga tujuan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan dapat dicapai secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arabiah, A., Darmi, D., Amidin, A., Warisno, A., & Tajuddin, N. (2026). Manajemen Perubahan Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Bagi Adaptasi Organisasi. *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi* , 9(2), 70-77.
- Ausat, AMA., Suparwata, DO, & Risdwiyanto, A. (2025). Optimalisasi Kompetensi Digital sebagai Strategi Adaptasi Dinamis Wirausahawan dalam Menghadapi Disrupsi Pasar di Era Digital. *Jurnal Minfo Polgan* , 14 (1), 173-182.
- Bennett, J. W. (1976). *The Ecological Transition Cultural Anthropology and Human Adaptation* (h 257). New York: Pergamon Press Inc.
- Cinderela Dwi Prameswari, I Gusti Putu Sudiarna, & I Nyoman Suarsana. (2023). Bentuk Adaptasi Etnis Bugis terhadap Lingkungan Sosial-Budaya di Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* , 2(3), 940–947.
- Darmawan, M., Athalla, MRA, Hutasoit, OBY, Cahyadi, RD, & Lukman, F. (2025). Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap pelaksanaan Good Governance di Kementerian Dalam Negeri di Era Reformasi Birokrasi. *Jurnal Kontemplativa Sosial* , 3 (1), 12–29.
- Dere, P. S. ., Sebastianus Ratu Ariana, Agni, P. M. ., Majid, N. C. D. ., Mau, G. C. ., Nenotek, N. Y. ., Mas'ud, F. ., & Nassa, D. Y. . (2025). Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kupang). *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* , 3(02), 1259–1266.
- Fina Berliana Azkiya, Afifi Nudita, Nadya Ananda Putri, Sandra Nufadila Setia, & Suwandi. (2025). Relevansi Teori Sistem Terbuka dalam Dinamika Organisasi Masa Kini. *Jurnal Tinjauan Pustaka* , 1 (1), 120-128.
- Germana, Deden Haria. (2025). *Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya untuk Kualitas Pelayanan: Sebuah Studi Korelasi*. Bojong: PT Nasya Expanding Management.
- Gunawan, RS, & Rosalia, F. (2026). Penyederhanaan Birokrasi Untuk Agile Bureaucracy Di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. *Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi* , 23 (1), 54–73.
- Hikmah, MN, Mahdani, R., & Syafrizal, S. (2026). Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya). *Jurnal Masyarakat Sosial* , 6 (2), 915–927.
- Iqrom, Pahrizal dan Muhammad Aprian Jailani. (2026). Ilmu Administrasi Publik Governance Public Pendekatan Kekuasaan dan Kepemimpinan Publik. Surabaya: Pustaka Asara.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* , 11 (2), 585.
- Munawaroh, K., & Amanda, S. D. (2025). Hubungan antara Lingkungan Organisasi dan Administrasi dalam Penggunaan Sistem Informasi Manajemen: Studi Etnografi pada Instansi Pemerintah. *Journal of Government and Social Issues (JGSI)* , 5(1), 1-11.
- Nurmandi, A., Muhammad Lutfi, Sumardi, S., & Zuly Qodir. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Model Demokrasi pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Wawasan Pemerintahan* , 1 (1), 49–61.
- Novianto. (2020). *Manajemen Strategis*. (Yogyakarta: deepublish)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Pribadi, Juhari, Yujitia Ahdarrijal, Erni Saharuddin. (2026). Transformasi Organisasi Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Digital. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru
- Riskamatul Umami, Ari Saputra, & Cholidah Utama. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Pembangunan Ekonomi. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* , 5 (1), 3143–3151.
- Rukmini karim, Monika Wutun, & I.G.A Rina Pietriani. (2023). Strategi Humas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan : (Studi Kasus Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang). *Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi* , 3(1), 161–173.
- Salman. (2024). Digitalisasi Birokrasi: Efisiensi Pelayanan di Disdukcapil Sinjai. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* , 21(2), 62–70.
- Seran, A. F., Daga, L. L., & Tuhana, V. E. (2023). Pola Komunikasi Organisasi Dalam Mempertahankan Solidaritas Anggota : (Studi Deskriptif Pada Organisasi Ikatan Mahasiswa Malaka Kupang). *Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi* , 2(1), 9–18.